



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 April 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN
SUB UNIT KERJA : DIREKTORAT ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERWIN DIMAS
2. Jabatan : DIREKTUR ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN
3. NHK : 21748

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 41.104.111.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/134 m2 di KAB / KOTA BOGOR, LAINNYA Rp. 800.000.000
2. Tanah Seluas 98490 m2 di KAB / KOTA INDRAGIRI HULU, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 984.900.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 228 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH TANPA AKTA Rp. 12.330.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 486 m2/622 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, LAINNYA Rp. 6.788.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 487 m2/290 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 4.896.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 452 m2/385 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 980.360.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , LAINNYA Rp. 11.824.851.000
8. Tanah Seluas 41088 m2 di KAB / KOTA KAMPAR, LAINNYA Rp. 2.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 147.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO SEDAN Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOTOR, KAWAZAKI 150 RR Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.



40.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	735.600.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.696.103.910
F. HARTA LAINNYA	Rp.	1.400.000.000
Sub Total	Rp.	45.082.814.910
III. HUTANG	Rp.	5.300.916.630
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	39.781.898.280

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **8 Mei 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.